

Evaluation Of Accountability Of School Operational Assistance Fund Management As An Effort To Realize Good Governance In Schools

[Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Di Sekolah]

Nur Istiqomah¹⁾, Fityan Izza Noor Abidin ^{*2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : fityan@umsida.ac.id¹⁾.

Abstract *This research aims to determine the Evaluation of Accountability for Management of BOS Fund as an Effort to Realize Good Governance in Schools. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this research were the Principal, Treasurer of BOS SMK, School Committee and Teachers involved in the BOS SMK management program. The object of this research is data related to the management of SMK BOS funds. The location of this research is in the YAPALIS Krian Vocational High School environment which is under the auspices of the Al-Islam Krian College Foundation. Data collection procedures in this research used various techniques, namely interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are: Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing/Verification. The results of this research indicate that the application of good governance principles in the accountability of managing BOS funds at YAPALIS Krian Vocational School has gone quite well because it is in accordance with the indicators of good governance, namely transparency, openness and the rule of law*

Keywords - *Accountability; Management of School Operational Assistance Funds; Good government*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Di Sekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS SMK, Komite Sekolah dan Guru yang terkait dalam manajemen program BOS SMK. Objek penelitian ini adalah data yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMK. Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan YAPALIS Krian yang berada dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMK YAPALIS Krian sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator good governance, yaitu transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.*

Kata Kunci - *Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah; Good Governance*

I. PENDAHULUAN

Istilah *Good Governance* pertama kali dipopulerkan oleh *World Bank* dan mempublikasikannya pada tahun 1992. Jika dilihat dari istilahnya, “good” memiliki makna “baik” dan “governance” merupakan kata sifat yang memiliki arti “tata cara pengendalian atau tindakan”. Oleh karena itu, *good governance* sebagai salah satu tata kelola pemerintah yang dikelola secara mutlak dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat [1].

Lebih lanjut, [2] menjelaskan bahwa prinsip *good governance* kini menjadi cita-cita dari semua pemerintahan di era modern. Secara sederhana *Good governance* adalah model sekaligus praksis pemerintahan yang ditandai oleh adanya kerja sama/mitra antara pemerintah, warga, dan swasta dengan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat yang memiliki keberpihakan yang jelas dan tegas.

Good governance juga dapat dilakukan di lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan artikel [3] yang menyatakan bahwa suatu negara bisa dikatakan maju jika pendidikan di suatu negara tersebut maju, karena pendidikan di suatu negara sangatlah berpengaruh dalam memajukan dan membangun suatu negara serta dapat meningkatkan taraf hidup pada masyarakat. Pendidikan berperan penting untuk membentuk karakter masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat membangun negara yang maju. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peluang memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu adalah dengan menyelenggarakan program penyediaan dana bagi pelajar programnya disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu program pemerintah yang berfungsi guna pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Menurut [4] tujuan dari diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, [5] menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pasal 48 Sistem Pendidikan Nasional memuat pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kemendikbud membuat strategi baru tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan adanya Permendikbud akan mendukung penguatan pengelolaan keuangan pendidikan, seperti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi belanja pendidikan, sehingga mendorong peningkatan kualitas belanja pendidikan. Kebijakan pemerintah yaitu mewajibkan semua sekolah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas adalah istilah yang sangat erat hubungannya dengan ilmu akuntansi dan manajemen [6]. Hal tersebut sesuai dengan pendapat [7], yaitu akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek antara lain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas prosedural. Hal tersebut juga sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengelolaan dana yang menerapkan prinsip pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah guna mencapai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat sasaran dan meminimalkan tingkat penyimpangan dan penyelewengan sehingga dapat mewujudkan *good governance* dan akan berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian "**Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance* di Sekolah**".

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya mewujudkan *good governance* di sekolah.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak [8].

Dan sebagaimana diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya di lokasi penelitian. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah agar peneliti dapat terjun langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Maka pendekatan deskriptif kualitatif ini dianggap sangat cocok, karena pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, selanjutnya penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi

sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah menghimpun informasi atau mengumpulkan data, membuat kesimpulan dan laporan.

Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagai penerima dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPALIS Krian yang berada dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Alasan pemilihan tempat penelitian dikarenakan peneliti bekerja di SMK YAPALIS Krian yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data lebih akurat dibandingkan dengan di SMK lainnya. Selain itu SMK YAPALIS Krian dari mulai tahun berdiri yaitu tahun 2008 hingga pada tahun 2022 mengalami perkembangan peserta didik yang signifikan. Menurut data pokok Pendidikan tahun pelajaran 2021/2022 semester ganjil atau tahun 2022 SMK YAPALIS Krian termasuk memiliki peserta didik terbesar kedua di Kecamatan Krian sekitar 1.472 peserta didik jika dibandingkan dengan SMK sekitar yang berada di Kecamatan Krian.

Tahapan Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan prosedur penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didesain secara longgar, tidak ketat sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan [9]. Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, adapun langkahnya sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan
Pada tahap ini dilakukan studi lapangan dilakukan untuk mengkaji, mengetahui, dan mempelajari keadaan objek penelitian di SMK YAPALIS Krian untuk mengetahui metode yang digunakan untuk pemecahan masalah yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif [10].
2. Perumusan Masalah
Pada tahap selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian sekaligus menentukan tujuan penelitian. Perumusan masalah didapat dari hasil analisis penelitian pada waktu studi lapangan dan data yang diambil dari hasil wawancara kepala sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), komite sekolah dan guru tersebut. Hasil perumusan masalah ini sekaligus dijadikan tujuan dalam penelitian yang dilakukan .
3. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Pada tahap yang ketiga dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada tahap kedua. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data yang akan digunakan pada tahap analisis. Pada proses analisis dikaji data-data yang ada menggunakan metode yang telah peneliti pelajari pada tahap awal [11].
4. Analisis
Pada tahap ini dilakukan analisa pembahasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibandingkan dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Dari hasil pengolahan data pada tahap sebelumnya akan digunakan sebagai bahan analisa lebih lanjut guna mengetahui pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah tersebut. Hasil dari analisa pengelolaan dana BOS diharapkan dapat memberikan referensi bagi sekolah dalam pengelolaan dana BOS sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi.
5. Kesimpulan
Pada tahap ini, peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesimpulan ini berupa pernyataan yang diambil dari analisis yang dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.
6. Saran
Sebagai tindak lanjut dari hasil pernyataan kesimpulan, peneliti merumuskan saran-saran berkaitan dengan proses yang berjalan pada objek peneliti agar sekiranya dapat memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan berdasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala SMK YAPALIS Krian
Peneliti memilih Kepala Sekolah sebagai informan pertama dikarenakan Kepala Sekolah tentunya mengetahui semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Apalagi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepala sekolah sebagai pihak pertama yang menyetujui anggaran tersebut digunakan atau direalisasikan untuk apa saja.
- b. Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK YAPALIS Krian

Yang kedua peneliti memilih bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikarenakan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan di atur oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut, sehingga data dari bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hal yang paling utama dalam penelitian ini.

c. Komite SMK YAPALIS Krian

Selanjutnya peneliti memilih komite sekolah dikarenakan komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komite sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait; kebijakan dan program sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

d. Guru SMK YAPALIS Krian

Karena Guru sebagai salah satu penerima manfaat dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh SMK YAPALIS Krian.

e. Petugas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Cabdin Sidoarjo

Informan kunci dari segi akuntansi publik, peneliti memilih petugas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sidoarjo dikarenakan petugas tersebut yang membantu dalam segi perencanaan, pelaporan dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jenis dan Sumber Data

Menurut [12], sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara Kepala Sekolah SMK YAPALIS Krian, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Guru dan Petugas BOS dari Cabang Dinas.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen laporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) [13].

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling melengkapi dan menunjang tentang evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK YAPALIS Krian [14].

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode wawancara identik dengan *interview*, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi secara sistematis atas dasar tujuan penelitian.

Interview ada 3 macam yaitu :

a. *Interview* Tak Terpimpin

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara di mana *interview* tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai.

b. *Interview* Terpimpin

Interview terpimpin merupakan wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. *Interview* Bebas Terpimpin

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara *interview* tak terpimpin dan *interview* terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata dia menyimpang.

Dari berbagai jenis *interview* di atas, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya bahwa peneliti memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Peneliti menggunakan cara ini karena untuk mendapatkan data yang relevan dan juga tidak menginginkan adanya kekakuan antara peneliti sebagai penginterview dengan orang yang di *interview*.

Adapun beberapa subjek informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Informan

No	Nama Informan	Unsur	Inisial
1	Drs. Mujiono, M.A.P	Kepala Sekolah	M
2	Dra. Hj. Lilis Arofah	Bendahara BOS	LA
3	Drs. Roziq	Komite	R
4	Ellyta Norsita Sophia, ST., M.Pd	Guru	ENS
5	Rima Citra Fiyanti, S.Sos	Petugas BOS Cabdin	RCF

2. Observasi

Observasi untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai fenomena-fenomena baik berupa peristiwa maupun tindakan dalam situasi yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan umum SMK YAPALIS Krian. Khususnya observasi ini dilakukan untuk mengamati Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini secara umum adalah cara mengumpulkan data dengan menelusuri data historis. Dokumen berupa kutipan dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dana BOS selama tahun 2022 berlangsung, yaitu :

- a) ARKAS
- b) Lembar Kertas Kerja Tahap
- c) Buku Kas Umum (BKU)
- d) Buku Pembantu Kas Tunai (BKU - Tunai)
- e) Buku Pembantu Bank (BKU - Bank)
- f) Buku Pembantu Pajak (BKU - Pajak)
- g) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (K7a)
- h) Buku Pembantu Rincian Objek Belanja
- i) Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS - Barang Modal/Aset (BHM)
- j) Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS - Barang Habis Pakai (BHP)
- k) Laporan BOS Online Kemdikbud

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu cara menganalisis data penelitian yang kita temukan di lapangan, analisis data juga berfungsi untuk meringkas dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Berikut langkah-langkah analisis data model interaktif [15]:

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Yaitu pengumpulan data awal atau data mentah yang belum diolah dari hasil wawancara oleh Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Guru dan hasil observasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dokumentasi Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh peneliti.

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Setelah semua data terkumpul penyerdehanaan dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan dan mentransformasikan keabsahan data asli menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Data *Display* (Penyajian Data)

Bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah naratif, menyajikan data dalam bentuk kumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. data yang terkumpul dibandingkan dengan Permedikbud Nomor 6 Tahun 2021, dan selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil SMK YAPALIS Krian

SMK YAPALIS Krian berdiri sejak tahun 2008, dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam (YAPALIS) Krian. Yayasan Perguruan Al-Islam (YAPALIS) Krian, adalah suatu Lembaga Sosial Keagamaan, beraskan Islam berdiri sejak 1 Agustus 1964. Di usia yang relatif muda, SMK YAPALIS Krian telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, sehingga diawal ijin operasionalnya dari Diknas turun dan dibukanya pendaftaran siswa baru, perkembangan jumlah kelas (rombongan belajar) meningkat sangat signifikan.

Adapun sampai saat ini SMK YAPALIS Krian telah memiliki 5 Kompetensi Keahlian antara lain Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, serta Perbankan dan Keuangan Mikro. SMK YAPALIS Krian berada di Jl. Kyai Mojo No. 18 Dusun Jeruk RT 002 RW 001 Desa Jerukgamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dengan Kode Pos 61262.

Pembelajaran di SMK YAPALIS Krian dilakukan mulai dari pagi hari hingga sore hari. Dalam seminggu, pembelajaran tatap muka dilakukan selama 6 hari. Dalam kegiatan belajar mengajar SMK YAPALIS Krian menggunakan Kurikulum 2013 - Spektrum 2018 untuk rombongan belajar/kelas XI dan XII sedangkan Kurikulum IKM untuk rombongan belajar/kelas X. SMK YAPALIS Krian memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM) Nomor : PD.35.21.02274 pada tanggal 8 Desember 2021.

Berikut ini adalah Identitas dari Satuan Pendidikan :

Nama Satuan Pendidikan : SMK YAPALIS Krian
 NPSN : 20554854
 Status Sekolah : Swasta
 Jenjang Pendidikan : SMK
 Akreditasi Sekolah : Terakreditasi "A"
 Alamat : Jl. Kyai Mojo No. 18 Jerukgamping
 Kecamatan : Krian
 Kabupaten : Sidoarjo
 Provinsi : Jawa Timur
 Kode Pos : 61262
 Waktu Penyelenggaraan : 6 Hari/Pagi - Sore Hari
 No. Telepon/Fax : (031) 8971747

Motto, Visi dan Misi SMK YAPALIS Krian

a. Motto SMK YAPALIS Krian

Mengedepankan mutu dan kualitas pembelajaran.

b. Visi SMK YAPALIS Krian

Tampil beda untuk meraih prestasi yang bernuansa islami dan berwawasan luas.

c. Misi SMK YAPALIS Krian

1. Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berakhlakul kharimah.
2. Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang terampil, cerdas dan mandiri.

Struktur Organisasi SMK YAPALIS Krian

SMK YAPALIS Krian berada dibawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Saat ini SMK YAPALIS Krian dipimpin oleh Drs. Mujiono, M.A.P. sebagai Kepala Sekolah dengan dibantu oleh 4 Wakil Kepala Sekolah, yaitu :

1. Nur Rochmad, S.Kom, M.A.P sebagai Waka Kurikulum,
2. Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd sebagai Waka Humas,
3. Nowo Triwayatno, S.Pd sebagai Waka Sarana dan Prasarana,
4. Ainur Roziq, S.Kom sebagai Waka Kesiswaan.

Karena SMK YAPALIS Krian terdapat 5 Kompetensi Keahlian, maka setiap Kompetensi Keahlian terdapat Ketua Kompetensi Keahlian. Dimana Ketua tersebut diambil dari unsur Guru/Tenaga Pendidik. Ketua Kompetensi Keahlian sebagai berikut :

1. Risky Wahyu Pambudi, S.Pd sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,
2. Slamet Mulyono, S.Kom sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan,
3. Ary Indrawan, S.Kom sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia,
4. Farkhan, S.Pd sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga,
5. Ayu Tri Irvianti, S.Pd sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro.

Sebagaimana pada uraian yang telah dijelaskan diatas, gambar Struktur Organisasi SMK YAPALIS Krian sebagai berikut ini :

Identitas Informan

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.

Tabel 2. Data Informan

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Inisial	Tanggal Wawancara
1	Drs. Mujiono, M.A.P.	Laki-laki	Kepala Sekolah	M	18 April 2023
2	Dra. Hj. Lilis Arofah	Perempuan	Bendahara BOS	LA	18 April 2023
3	Drs. Roziq	Laki-laki	Komite Sekolah	R	19 April 2023

4	Ellyta Norsita Sophia, ST., M.Pd	Perempuan	Guru	ENS	18 April 2023
5	Rima Citra Fiyanti, S.Sos	Perempuan	Petugas BOS Cabdin Sidoarjo	RCF	17 April 2023

Dari data di atas menggambarkan jenis informan penelitian antara lain Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci, Drs. Mujiono sebagai informan utama sedangkan Dra. Hj. Lilis Arofah, Drs. Roziq dan Ellyta Norsita Sophia, ST., M.Pd sebagai informan pendukung atau tambahan.

Analisis Data dan Hasil Penelitian

Evaluasi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga lembaga pendidikan hal ini mulai disadari dan disikapi dengan melakukan redesain sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya adalah mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Menurut [16], "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara [17] mendefinisikan akuntabilitas "*is the degree to which local governments have to explain or justify what they have done or failed to do.*" Lebih lanjut dikemukakan bahwa "*Accountability can be seen as validation of participation, in that the test of whether attempts to increase participation prove successful is the extent to which people can use participation to hold a local government responsible for its action.*" Pendapat Zamroni mengenai akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Ini berarti akuntabilitas hanya dapat terjadi jika ada partisipasi dari stakeholders sekolah. Semakin kecil partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, maka akan semakin rendah pula akuntabilitas sekolah.

Jadi, definisi konseptual akuntabilitas dalam penelitian ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

A. Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel.

Kata komitmen ini berasal dari bahasa latin yaitu "*commiter*" yang artinya adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan dan mempercayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu atau kontrak. Selain setia pada suatu perjanjian, komitmen juga dapat terlihat dari tindakan. Sekarang ini, di dalam dunia kerja, organisasi, dan hubungan manusia ini dibutuhkan komitmen. Kemampuan melakukan komitmen juga dibutuhkan dalam suatu organisasi serta Perusahaan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mencapai visinya. Misi perusahaan didefinisikan sebagai tujuan dan alasan didirikannya perusahaan atau lembaga tersebut. Misi juga menentukan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Sedangkan, Akuntabel adalah suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Tindakan ini menjadi suatu pilar penting untuk kemajuan organisasi mengingat bahwa dalam suatu perusahaan atau lembaga, para pemangku kepentingan telah mempercayakan hak-hak mereka kepada seorang pemimpin atau pengelola.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang pertama yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah :

“Menurut saya, agar komitmen antara pimpinan dan tim manajemen BOS dapat berjalan dengan lancar, baik dan tertib perlu dibentuk adanya SK Tim Manajemen BOS. Dengan adanya SK tersebut maka seluruh tim manajemen dapat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tugas dan komitmennya, sehingga dapat menghasilkan laporan BOS yang akuntabel. Sedangkan pada tingkat pusat kepala sekolah pun harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana BOS pada setiap tahunnya.” (wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. tanggal 18 April 2023)

Hasil wawancara tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :

“Jadi di sekolah ini dibentuk SK Tim Manajemen BOS, sehingga seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan seluruh tim tersebut terlibat. Ini salah satu cara agar komitmen yang telah disepakati dapat terlaksana dengan lancar, baik dan tertib.” (wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah tanggal 18 April 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Drs. Roziq selaku komite sekolah adalah sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan dana BOS disekolah itu dibentuk SK Tim Manajemen BOS, itu ikhtiar kita untuk dapat melaksanakan komitmen ini penuh dengan tanggung jawab.” (Wawancara dengan Drs. Roziq 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan dana BOS ini kita sebagai guru juga dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sehingga untuk menjalankan komitmen ini dibentuklah suatu SK Tim Manajemen BOS. Dengan demikian semua anggota tim akan berusaha dengan tugasnya dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.” (Wawancara dengan Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd tanggal 18 April 2023)

Hasil wawancara dengan Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Di dalam Juknis sendiri telah dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan pelaporan dana BOS agar menjadi laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Salah satunya dengan membentuk SK Tim Manajemen pengelolaan dana BOS, ini dibuat supaya tercipta komitmen antara pimpinan dengan panitia itu sendiri. Sedangkan dari segi pusat, direktorat menginginkan komitmen dari sekolah berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah.” (Wawancara dengan Rima Citra Fiyanti, S.Sos 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen antara pimpinan dengan tim manajemen pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tim Manajemen BOS yang terdiri dari pimpinan, guru, komite dan orang tua/wali murid yang menjadi tim manajemen BOS. Setiap empat bulan sekali/tiap enam bulan sekali sekolah akan membuat laporan pertanggungjawaban BOS. Sedangkan setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah. Hasil penelitian ini sesuai dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh: a. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sidoarjo; dan b. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah/ Madrasah.

B. Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

[18] berpendapat bahwa Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri segala bentuk penyusunan laporan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pelaporan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Peraturan-peraturan tersebut tercantum dalam juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dikelola.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah adalah sebagai berikut :

“Sekolah mempunyai juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS di sekolah. Karena dengan adanya juknis tersebut sekolah dapat melangkah dengan mudah sesuai peraturan perundang-undangan. Di dalam juknis tersebut mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan dana BOS. Sehingga itu memudahkan sekolah dalam melakukan segala proses dari mulai perencanaan hingga pelaporan kepada kementerian.” (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. tanggal 18 April 2023)

Hal ini didukung pernyataan Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS:

“Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) itu sekolah membuat dengan berpedoman pada JUKNIS yang berlaku.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Hasil wawancara dengan Drs. Roziq selaku komite sekolah adalah sebagai berikut :

“Juknis itu yang digunakan sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS.” (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Dalam penyusunan suatu anggaran itu harus ada petunjuknya atau pedomannya sehingga dana yang dikeluarkan itu jelas penggunaannya.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Semua sekolah harus memiliki Juknis BOS. Karena juknis BOS itu sendiri tiap tahun selalu ada dan biasanya ada perubahan dalam poin penggunaannya. Juknis itu sendiri yang nantinya akan digunakan oleh sekolah dalam hal penganggaran suatu RKAS. Juknis ini juga berisi tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah sehingga sekolah bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan sekolah.” (Wawancara 17 April 2023)

Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas yang kedua yaitu harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman sangat penting bagi sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan. Sehingga, setiap sekolah wajib memiliki Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dapat mewujudkan salah satu prinsip akuntabilitas tersebut. SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hasil penelitian ini didukung dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 yaitu Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sudah sesuai dengan tujuan, target dan sasaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan BOS pada SMA/SMALB/SMK yaitu untuk (a) membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; (b) meningkatkan angka partisipasi kasar; (c) mengurangi angka putus sekolah; (d) mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; (e) memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau (f) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi tujuan tersebut.

Sasaran BOS yaitu SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan. SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi sasaran BOS tersebut.

Sedangkan untuk target Dana BOS yaitu Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember).

Sesuai dengan hasil wawancara SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi target tersebut.

C. **Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan**

Ken Mcelroy berpendapat bahwa tujuan didefinisikan sebagai langkah pertama untuk dapat menuju sebuah kesuksesan dan juga tujuan merupakan sebuah kunci mencapai sebuah kesuksesan. Tujuan dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu sendiri adalah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Sementara, Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Sasaran dana BOS yaitu SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah yaitu :

“Dana BOS yang telah diperoleh telah dikelola dengan baik oleh tim manajemen BOS sesuai dengan perencanaan yang telah diinputkan pada aplikasi ARKAS. Mengenai serapannya memang masih belum seimbang, karena dana BOS masih banyak digunakan pada kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah sekitar 44,35% dan Administrasi Kegiatan Sekolah sekitar 23,72% dimana sisanya untuk kegiatan yang lainnya. Tetapi itu membuktikan bahwa dana BOS yang telah dikelola mencapai tujuan dari pemerintah.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Hal tersebut di dukung dengan pendapat Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :

“Menurut saya, dana BOS sudah dikelola sesuai dengan pedoman dari Juknis. Dan Tim manajemen melakukan pengelolaan dana BOS dengan sangat baik, sehingga tujuan pemerintah memberikan bantuan tersebut dapat tercapai. Untuk serapannya, Alhamdulillah dapat terserap 100% untuk seluruh poin kegiatan yang ada dalam Juknis.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

“Tujuan pemerintah untuk memberikan Dana BOS adalah untuk mermbantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal dan ini sudah diupayakan oleh sekolah untuk mencapainya. Setiap tahunnya dana BOS yang telah diberikan pemerintah dapat terserap 100% oleh sekolah.” (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Saya ikut masuk dalam Tim Manajemen BOS. Kami mulai dari perencanaan itu sudah mengupayakan agar tujuan dari diberikannya dana BOS ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Dan tim manajemen BOS selalu menata bagaimana agar serapannya ini dapat merata untuk setiap poin kegiatan yang ada pada Juknis.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Pemerintah memberikan bantuan dana BOS tentunya memiliki tujuan yaitu untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal. Dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. SMK YAPALIS Krian telah mencapai tujuan tersebut meski serapannya tidak merata, karena memang semua itu tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Dan sekolah sendiri yang mengetahui kebutuhan dari sekolahnya untuk dapat menentukan untuk apa saja bantuan itu nantinya. Dan semoga kedepannya sekolah dapat meratakan daya serapannya untuk 12 poin kegiatan.” (Wawancara 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang ketiga yaitu harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah memberikan bantuan dana BOS adalah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS dapat

dipergunakan untuk keperluan sekolah. Sehingga SMK YAPALIS Krian menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan diberikannya dana BOS. Dan untuk daya serapannya SMK YAPALIS Krian telah terserap 100%, meski tidak merata diantara 12 poin kegiatan tersebut.

Hasil wawancara tersebut didukung dengan undang-undang nomor 51 tahun 2020 yaitu a. Membebaskan pungutan bagi seluruh Peserta didik SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs terhadap biaya operasional sekolah; b. membebaskan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; c. menyediakan sarana dan prasarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik; d. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta; e. menyediakan layanan khusus bagi peserta didik yang berbakat dan peserta didik yang lambat belajar. f. memfasilitasi pembelajaran dan penilaian secara dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) dan delivery, bagi peserta didik selama masa pandemi Corona Viruses Disease (COVID-19).

D. Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan; apa yang tampak dalam khayalan; penglihatan; pengamatan. Sedangkan misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya.

Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hasil adalah sesuatu yang diperoleh dari sebuah proses atau usaha yang telah dilakukan.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Berikut hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. sebagai kepala sekolah :

“Manfaat yang didapatkan oleh sekolah dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggara pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah.” (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. pada tanggal 18 April 2023)

Berikut penuturan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

“Manfaat yang didapatkan oleh sekolah dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggara pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah.” (Wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah pada tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

“Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya dana BOS ini salah satunya pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, serta tambahan honor guru.” (Wawancara dengan Drs. Roziq pada tanggal 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Manfaat yang diperoleh dari adanya dana BOS antara lain tambahan honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.” (Wawancara dengan Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd pada tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Banyak sekali manfaat yang diperoleh sekolah dengan adanya program BOS ini. Di dalam juknis pun telah dijelaskan untuk apa saja dana BOS ini dapat digunakan. Sehingga, dari poin penggunaan tersebut banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya program BOS ini. Peruntukan dana BOS pada tahun anggaran 2022 adalah untuk 12 poin penggunaan antara lain pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan assesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus/praktik kerja industri/lapangan di dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan uji kompetensi keahlian/sertifikasi kompetensi keahlian, pembayaran honor.” (Wawancara dengan Rima Citra Fiyanti, S.Sos pada tanggal 17 April 2023)

Hasil dari wawancara diatas mengenai prinsip akuntabilitas keempat yaitu harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa sekolah telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien digunakan untuk membiayai seluruh pos pengeluaran yang telah dianggarkan.

Visi misi dari SMK YAPALIS Krian yaitu Visi SMK YAPALIS Krian : Tampil beda untuk meraih prestasi yang bernuansa islami dan berwawasan luas. Sedangkan Misi SMK YAPALIS Krian yaitu (1) Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berakhlakul kharimah. Dan (2) Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang terampil, cerdas dan mandiri. Orientasi pencapaian visi misi ini juga selaras dengan hasil dan manfaat yang di dapatkan dengan penggunaan Dana BOS. Dengan adanya dana BOS akan memudahkan sekolah SMK YAPALIS Krian untuk mencetak generasi yang terampil, cerdas dan mandiri. Karena dengan adanya dana bantuan tersebut siswa akan focus belajar tanpa memikirkan biaya pendidikannya.

E. Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Selain itu, jujur bisa juga dikatakan sebagai suatu perilaku tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Sementara itu, objektif adalah keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Transparan dapat diartikan tembus pandang atau bening. Apabila ditinjau dari institusi Pendidikan transparansi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang yang terkait dengan pendidikan (*stakeholder*), mengetahui dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan sekolah yaitu kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Inovatif juga sering dimaknai sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan *skill* guna beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di era digital seperti saat ini, perubahan di segala bidang sangat cepat terjadi. Maka dari itu, kemampuan inovatif sangat dibutuhkan agar tidak tertinggal zaman.

Berikut hasil wawancara dengan seluruh informan terkait prinsip akuntabilitas yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian. Hasil wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P. selaku kepala sekolah :

“Sekolah menyusun laporan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Juknis dan sesuai dengan petunjuk/arahan dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk tahapannya, awalnya sekolah pada bulan Juli tahun sebelumnya melakukan input data siswa pada Dapodik yang nantinya akan digunakan sebagai cut off perhitungan untuk perolehan dana BOS pada tahun anggaran yang akan datang. Kemudian akan terbit SK penerimaan dana BOS dari Kemendikbudristek biasanya pada bulan Februari, sehingga kita akan membentuk Tim Manajemen BOS di sekolah. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Sekolah akan melakukan pertemuan/rapat untuk penyusunan RKAS. Dari hasil pertemuan/rapat itu nanti kita dapat memverifikasi mana saja kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dapat dilakukan eksekusi pada tahun anggaran 2022 ini. Setelah RKAS dalam bentuk excelnya jadi dan sudah sesuai maka kita masukkan kedalam ARKAS. Pada tahun 2022 ini ada yang baru mbak, biasanya kita laporan secara manual yang semua laporan kita kerjakan menggunakan excel tapi sekarang lewat aplikasi ARKAS yang dari Kemendikbudristek ini. Jadi setelah RKAS tadi diinputkan dalam ARKAS kemudian kita akan melakukan pengajuan ke pusat untuk pengesahan ARKAS tersebut. Setelah disahkan oleh pusat baru kita bisa lanjut ke entri BKU untuk menginputkan pembelanjaan apa saja yang telah dieksekusi sesuai dengan bulannya. Tapi ini juga tidak bisa langsung diinputkan karena kan tidak selalu dana BOS ini cair tepat waktu. Kita bisa melakukan input tersebut kalau dana BOSnya sudah turun. Untuk pengambilan dana BOS itu sendiri juga harus sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa diambil sekaligus. Setelah input BKU kita sinkronisasi dan biasanya secara otomatis apa yang kita input pada ARKAS akan muncul pada website kemendikbud <https://bos.kemdikbud.go.id/>. Dan selanjutnya biasanya kita setiap 4 bulan sekali akan ada jadwal untuk pelaporan pertanggungjawaban ke Dinas setempat. Dari sini Dinas setempat dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah mengenai pengelolaan dana BOS. Biasanya Dinas akan melakukan pengecekan bukti-bukti penggunaan dana BOS apakah sudah sesuai ataukah masih kurang. Setelah dilakukan pengecekan oleh dinas bukti-bukti tadi kita simpan di Ruang BOS yang ada di sekolah untuk keperluan monitoring/pemeriksaan dari pihak terkait. Dari laporan pertanggungjawaban ini kita tahu bahwa laporan ini dapat dikatakan transparan, untuk pembelajaran inovatif kita bekerja sama dengan para guru agar bagaimana dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Berikut penjelasan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

“Ya, disini tersedia dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Wah tahapannya panjang sekali mbak kalau dijelaskan secara detail, intinya semua tahapan sudah ada di dalam juknis. Kita transparan kepada semua pihak yang menginginkan informasi terhadap laporan BOS, tetapi yang boleh menanyakan lebih detail dan mendalam adalah pihak yang berhak. Kami semaksimal mungkin melakukan pembelajaran yang inovatif agar anak-anak itu tidak cepat bosan.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

“Ya, tentu saja, sekolah sudah melakukan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan arahan dari dinas dan sesuai dengan juknis yang berlaku. Tahapan yang saya tahu disini sekolah biasanya membentuk SK Tim Manajemen BOS kemudian melakukan rapat untuk penyusunan RKAS. Setelah itu tim akan eksekusi apa saja pembelanjaan yang ada pada RKAS. Kemudian pada saat akan melakukan LPJ ke dinas selalu ada tanda tangan mengetahui komite pada laporan tersebut. Selanjutnya bukti-bukti disimpan disekolah untuk keperluan apabila ada pemeriksaan dan lain-lain. Sekolah selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Mengenai laporan BOS sudah dapat dikatakan transparan kepada semua pihak.” (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Sekolah sudah menyusun laporan pertanggungjawaban BOS pada ARKAS sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Disini saya juga masuk dalam Tim Manajemen BOS Sekolah. Yang saya tahu ketika SK penerima BOS sudah keluar, kepala sekolah akan membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah. Kemudian diadakan pertemuan untuk penyusunan RKAS Bersama komite sekolah. Selanjutnya untuk yang belanja-belanja sesuai RKAS dilakukan oleh Tim Manajemen BOS. Yang selanjutnya tim tersebut melaporkan pembelanjaan disertai bukti-bukti kepada bendahara untuk disusun secara rapi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada dinas. Kita para guru juga diberikan wawasan bagaimana agar mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan kita terbuka untuk seluruh stakeholder mengenai informasi dana BOS.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“SMK YAPALIS Krian ini tergolong tertib dan tepat waktu dalam melakukan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga termasuk tertib administrasi dalam penyusunan dokumen berupa Kwitansi dan bukti-bukti fisik yang diperlukan. Tahun 2022 SMK YAPALIS Krian termasuk dalam sekolah yang laporan pertanggungjawabannya rapi, bagus dan mendekati sempurna.” (Wawancara 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prinsip akuntabilitas yang kelima yaitu harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah jujur dalam pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan RKAS dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pelaporan dana BOS mulai tahun anggaran 2022 ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan ARKAS. Dan para tim manajemen BOS sekolah selalu melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan.

Selain itu, penggunaan dana BOS di sekolah SMK YAPALIS Krian juga dapat dikatakan objektif, hal ini dibuktikan dengan adanya proses/tahapan pengelolaan dana BOS yang sudah sesuai dengan Permendikbud No. 2 Tahun 2022 pasal 2 point d dan e yaitu (d) akuntabel adalah pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan; dan (e) transparan adalah pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan. Sehingga penggunaan dana BOS di SMK YAPALIS Krian sudah sesuai dengan undang-undang nomor tahun 2022. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu tingkat kinerja tim manajemen sekolah dalam pelaporan yang kurang cepat dan menggunakan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan laporan terkait pengelolaan dana BOS.

Setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak SMK YAPALIS Krian bersifat transparan sehingga dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan mengenai pengelolaan dana BOS dapat menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan. Dan juga setiap kegiatan yang dilakukan itu bagaimana agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk seluruh peserta didik.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan undang-undang nomor 51 tahun 2020 yaitu pasal 9 ayat 2 point f dan h yaitu (f) melakukan pembinaan dan pemantauan Program BOSDA dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOSDA; (h) menugaskan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Sehingga dengan pasal tersebut sekolah dapat meningkatkan Tingkat kejujuran, transparan, objektif dan inovatif dalam penyusunan akuntabilitas penggunaan dana BOS di SMK YAPALIS Krian. Selain itu

pasal 9 ayat 3 point e juga berhubungan dengan akuntabilitas yaitu (e) membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten (LO, realisasi, dan aset belanja modal) tiap tribulan. Dengan adanya peraturan itu sehingga pelaporan penggunaan dana BOS ini diawasi oleh tim manajemen BOSDA sehingga Tingkat kejujuran dan transparan pelaporan sangat tinggi.

Pengelolaan Akuntabilitas Agar Dapat Mewujudkan *Good Governance*

Dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan sebuah unsur untuk mempertahankan kepemimpinan yang layak yaitu melalui akuntabilitas. *United Nation Development Programme* (UNDP) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Sehingga lima prinsip akuntabilitas yang diterapkan tadi harus memenuhi unsur *good governance* yang ada yaitu transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Keterbukaan

Keterbukaan memiliki sikap dapat menerima masukan dari orang lain, serta berkenan menyampaikan informasi kepada orang lain. Keterbukaan adalah kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri informasi ini tidak bertentangan dengan asas kepatutan. Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan kerja sama bisa ditingkatkan, maka kita perlu bersikap terbuka.

3. Aturan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Diterapkannya *Good Governance* diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

SMK YAPALIS Krian juga berupaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut melalui akuntansi pengelolaan dana BOS. Upaya yang dilakukan SMK YAPALIS Krian yaitu dengan menerapkan tiga konsep *good governance* pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Berikut penjelasannya :

A. Harus Ada Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Untuk Melakukan Pengelolaan Pelaksanaan Misi Agar Akuntabel Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen antara pimpinan dengan tim manajemen pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tim Manajemen BOS yang terdiri dari pimpinan, guru, komite dan orang tua/wali murid yang menjadi tim manajemen BOS. Setiap empat bulan sekali/tiap enam bulan sekali sekolah akan membuat laporan pertanggungjawaban BOS. Sedangkan setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah.

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak sekolah dapat membuktikan bahwa sekolah SMK YAPALIS Krian sudah menerapkan adanya transparansi dan keterbukaan. Pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi pihak yang membutuhkan, Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Hasil wawancara dengan informan terkait penerapan transparansi dan keterbukaan dalam upaya mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian dengan pertanyaan “Apakah sekolah mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada stakeholders internal dan eksternal?” yang menurut pendapat Drs. Mujiono, M.A.P. sebagai kepala sekolah :

“Ya, Sekolah mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Publikasi tersebut biasanya dilakukan lewat media grup whatsapp sekolah untuk stakeholders internal dan melalui laporan ringkas berupa hardfile dan juga softfile yang dikirimkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Sidoarjo serta laporan online melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai bentuk pemberitahuan untuk stakeholders eksternal. Publikasi internal diperuntukkan kepada seluruh pihak yang ada disekolah seperti guru, karyawan dan komite sekolah. Untuk di bagian eksternal kita publikasikan kepada Yayasan, orang tua/wali murid, Cabang Dinas dan juga Kementerian.” (Wawancara dengan Drs. Mujiono, M.A.P pada tanggal 18 April 2023)

Berikut penjelasan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

“Ya, semua kita publikasikan dari mulai perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS.” (Wawancara dengan Dra. Hj. Lilis Arofah tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

“Ya, sekolah melakukan publikasi pada setiap kegiatan sekolah terutama yang berhubungan dengan dana BOS.” (Wawancara dengan Drs. Roziq pada tanggal 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Ya, biasanya dipublikasikan melalui rapat internal dan dipublikasikan di papan informasi sekolah agar lebih mudah dilihat oleh orang yang membutuhkannya.” (Wawancara dengan Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd pada tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Ya, SMK YAPALIS Krian biasanya melalui laporan-laporan dan rapat-rapat disampaikan/diperlihatkan hasilnya seperti foto-foto kegiatan dan juga barang-barang yang telah dibeli menggunakan dana BOS. Selain itu dipublikasikan lewat papan informasi sekolah.” (Wawancara dengan Rima Citra Fiyanti, S.Sos pada tanggal 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai transparansi dan keterbukaan menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak SMK YAPALIS Krian sudah bersifat transparansi dan keterbukaan. Dimana transparansi dan keterbukaan tersebut merupakan unsur dari *good governance*, sehingga pelaporan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, transparan dan keterbukaan.

Penelitian ini juga sudah sesuai dengan Permendikbud No. 2 Tahun 2022. Menurut Permendikbud No. 2 Tahun 2022 pasal 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Dana BO dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan; b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas

belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan; dan e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Selain itu, SMK YAPALIS Krian juga sudah memenuhi prinsip *Good Governance* yang ketiga yaitu Aturan Hukum (*Rule of Law*). Setiap enam bulan sekali/setiap tahun sekolah akan membuat komitmen dengan pemerintah pusat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah. Hal ini dapat digunakan sebagai bukti secara tertulis bahwa SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi aturan penggunaan dana BOS sesuai aturan yang berlaku.

B. Harus Merupakan Suatu Sistem Yang Dapat Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

SMK YAPALIS Krian sudah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dalam Juknis (petunjuk teknis)/peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pemberi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Didalam juknis tersebut menjelaskan semuanya yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS diantaranya Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk: identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan; penguatan pelatihan griyaan (*in house training*); penguatan komunitas belajar bagi kepala dan pendidik; pelatihan mandiri dengan komunitas praktis; pelaksanaan diskusi terpumpun bersama dengan guru; dan/ atau peningkatan kapasitas literasi digital. kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya juknis tersebut dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi prinsip *Good Governance* yaitu transparan, keterbukaan dan aturan hukum. Dengan adanya juknis tersebut penggunaan dana BOS dapat diawasi karena pelaporan yang dibuat. Dan meminimalisir adanya kecurangan dalam penggunaan dana BOS karena sudah ada juknis resmi yang dikeluarkan.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2022 pasal 28 ayat 2 yaitu Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: pengembangan sumber daya manusia; pembelajaran dengan paradigma baru; digitalisasi sekolah; dan perencanaan berbasis data. Sehingga dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*.

Hasil ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMK Yapalis Krian. Menurut Drs. Mujiono, M.A.P selaku kepala sekolah berpendapat sebagai berikut :

“Ya, Sekolah memiliki keterbukaan dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Pada proses perencanaan keterbukaan itu ditandai dengan pembentukan tim manajemen BOS Sekolah yang kemudian tim tersebut akan melakukan analisis kebutuhan prioritas sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga tim tersebut dapat memberikan perencanaan kebutuhan sekolah untuk dentrykan kedalam Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yaitu ARKAS. Setelah dilakukan entryan perencanaan kemudian tim tersebut akan melakukan pembelanjaan secara mandiri, sehingga pihak pimpinan tidak turut serta dalam pembelanjaan tersebut itulah keterbukaan dalam penggunaan dana BOS ini. Kemudian pada proses pelaporan tim manajemen akan melakukan pemberkasan sesuai dengan pelaporan yang diminta oleh kementerian.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Berikut penjelasan dari Dra. Hj. Lilis Arofah selaku bendahara BOS adalah :

“Ya, dalam membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan/pengelolaan dan pelaporan itu kita membuat dengan berpedoman atau berdasarkan pada petunjuk teknis (JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2022. Jadi dalam penggunaan Dana BOS itu guru, karyawan, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap kegiatan dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan itu kita masukkan kedalam aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yaitu ARKAS. Dengan menggunakan ARKAS ini kami merasa terbantu karena penggunaannya yang cukup mudah meski awal-awal kita mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya dan aplikasi ini mulai digunakan pada cawu 2 yaitu sekitar bulan Juli 2022.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Menurut pendapat Drs. Roziq selaku komite sekolah sebagai berikut :

“Ya, sekolah menerima saran atau kritikan dari pihak internal maupun eksternal demi terlaksananya program BOS yang akuntabel dan transparans.” (Wawancara 19 April 2023)

Ellyta Norsita Sophia, ST, M.Pd selaku guru juga berpendapat sebagai berikut :

“Jelas, dalam proses penyusunan RKAS guru, komite dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkan mana yang akan dijadikan prioritas. Penggunaan/pencatatan Dana BOS itu dicatat di ARKAS dan buku kas sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran itu dicatat di ARKAS dan buku kas sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan kepada setiap stakeholders yang ingin melihat jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi. Semua dana BOS yang kita gunakan itu sesuai dengan RKAS yang telah dibuat sebelumnya, apalagi ada yang namanya bukti seperti kwitansi itu sudah mendukung bahwa penggunaan dana BOS itu digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.” (Wawancara tanggal 18 April 2023)

Sementara pendapat dari Rima Citra Fiyanti, S.Sos sebagai informan kunci adalah sebagai berikut :

“Ya, SMK YAPALIS Krian ini terbuka terhadap stakeholders yang berkepentingan, yaitu melibatkan tim manajemen, komite, guru dan karyawan dalam menyusun anggaran BOS dengan cara mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan. SMK YAPALIS Krian juga terbuka dalam proses penggunaannya/ pencatatannya semuanya bisa dilihat langsung pada ARKAS dan juga di laporan pertanggungjawaban dan pada saat menggunakan dana BOS juga harus disertai dengan kwitansi dan juga bukti-bukti. SMK YAPALIS Krian menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi dan bukti-bukti fisik sebagai pendukungnya.” (Wawancara 17 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai keterbukaan (*openness*) menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki unsur keterbukaan. Sehingga pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menerima saran dan masukan dari setiap *stakeholder* baik dari Internal maupun Eksternal Lembaga.

C. Harus Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance

Pada dasarnya Pemerintah memberikan bantuan dana BOS untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih optimal. Dana BOS dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah. Sehingga SMK YAPALIS Krian menggunakan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah yang menjadi dasar dari tercapainya tujuan diberikannya dana BOS. Dan untuk daya serapannya SMK YAPALIS Krian telah terserap 100%.

SMK YAPALIS Krian sudah Dapat Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran penggunaan dana BOS Yang Telah Ditetapkan Sesuai dengan undang-undang nomor 51 tahun 2020 yaitu untuk Kegiatan Pembelajaran dalam jaringan (*daring*), luar jaringan (*luring*) dan *delivery*, Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan peserta didik dan kegiatan Ekstra kurikuler peserta didik, Kegiatan Penilaian dan ujian, Inovasi dan Pencitraan kelembagaan, Pengadaan, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/ Bangunan Sekolah, Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Pembentukan karakter bangsa, Membantu peserta didik Miskin, Pembiayaan pengelolaan dan pelaporan, Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Pengenalan lingkungan sekolah, Pembayaran honorarium bulanan guru honorer, tenaga kependidikan honorer, Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan selain tugas pokok, dan Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Literasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditunjukkan dengan adanya pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian melakukan transparan dan keterbukaan data. Hal ini juga di atur undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 3 point 4 yaitu Untuk laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya; b. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat, Laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari : 1. Buku kas umum; 2. Buku pembantu kas tunai; 3. Buku pembantu bank; 4. Buku pembantu pajak; 5. Realisasi penggunaan dana BOSDA; 6. Bukti fisik berupa faktur, kwitansi, SPJ pemberian honor dan lain-lain; 7. Laporan pembelian yang berupa aset/inventaris khusus sekolah negeri; 8. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Dengan adanya aturan itu dapat meminimalisir adanya penyelewangan dana BOS, karena pelaporan yang transparan dan keterbukaan. Hal ini sebagai Upaya untuk mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian.

Selain itu, pelaporan yang dibuat juga sudah memenuhi unsur aturan hukum yang mana segala bentuk pengeluaran harus ada bukti yang sah dari pihak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 3 point 3 yang menjelaskan beberapa hal yaitu Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah; Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bermaterai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000 tidak dikenakan materai, untuk transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dikenakan bermaterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000 dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp. 1.000.000 dikenai bea materai Rp. 6.000,-. Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah/madrasah dan lunas dibayar oleh bendahara Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah/madrasah sebagai bahan bukti dan bahan laporan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah memenuhi semua unsur *Good Governance* dalam prinsip akuntabilitas yang ketiga.

D. Harus Berorientasi Pada Pencapaian Visi Dan Misi Serta Hasil Dan Manfaat Yang Diperoleh Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa sekolah telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien digunakan untuk membiayai seluruh pos pengeluaran yang telah dianggarkan. Manfaat yang didapatkan oleh SMK YAPALIS Krian dengan adanya bantuan dana BOS antara lain meningkatkan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggara pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah. Hal ini sesuai dengan visi misi yang ada di SMK YAPALIS Krian.

Untuk mewujudkan *good governance* di SMK YAPALIS Krian, sekolah berupaya menerapkan konsep *good governance* diantaranya menerapkan konsep transparan dan keterbukaan dalam seluruh pelaporan yang di buat. Selain itu, SMK YAPALIS Krian juga Mempublikasikan setiap perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran BOS kepada stakeholders internal maupun eksternal. Publikasi tersebut biasanya dilakukan lewat media grup whatsapp sekolah untuk stakeholders internal dan melalui laporan ringkas berupa hardfile dan juga softfile yang dikirimkan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Sidoarjo serta laporan online melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai bentuk pemberitahuan untuk stakeholders eksternal. Publikasi internal diperuntukkan kepada seluruh pihak yang ada disekolah seperti guru, karyawan dan komite sekolah. Untuk di bagian eksternal kita publikasikan kepada Yayasan, orang tua/wali murid, Cabang Dinas dan juga Kementerian.

Selain itu, menurut undang-undang nomor 51 tahun 2020 bab 4 yaitu Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Monitoring ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Sidoarjo diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi dana penerima bantuan; 2. Penggunaan dana ditingkat sekolah; 3. Administrasi keuangan; 4. Pelaporan.

Laporan berupa hardfile juga dapat digunakan sebagai konsep *good governance* tentang aturan hukum. Dengan adanya laporan tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa SMK YAPALIS sudah menggunakan dan mengelola dana BOS secara efektif tanpa adanya kecurangan yang terjadi. Hal ini juga di atur dalam undang-undang nomor 51 tahun 2020 pasal 9 ayat 2 point i yaitu menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan BOSDA dari sekolah ke Tim manajemen BOS kabupaten baik secara Online maupun offline (hardcopy).

E. Harus Jujur, Objektif, Transparan Dan Inovatif Sebagai Katalisator Perubahan Manajemen Instansi Pemerintah Dalam Bentuk Pemutakhiran Metode Dan Teknik Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YAPALIS Krian menunjukkan bahwa telah jujur dalam pengelolaan dana BOS hal ini dibuktikan dengan pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan RKAS dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pelaporan dana BOS mulai tahun anggaran 2022 ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh

pemerintah yang disebut dengan ARKAS. Dan para tim manajemen BOS sekolah selalu melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan perencanaan yang dianggarkan.

SMK YAPALIS Krian ini tergolong tertib dan tepat waktu dalam melakukan laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga termasuk tertib administrasi dalam penyusunan dokumen berupa Kwitansi dan bukti-bukti fisik yang diperlukan. Tahun 2022 SMK YAPALIS Krian termasuk dalam sekolah yang laporan pertanggungjawabannya rapi dan bagus.

Hal ini menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian mewujudkan konsep *good governance* dalam pengelolaan dana BOS. Dengan adanya kwitansi dan bukti-bukti fisik yang ada menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan keterbukaan. Selain itu juga karena SMK YAPALIS Krian sudah menggunakan aplikasi ARKAS. Sehingga akan meminimalisir adanya kecurangan yang terjadi. Hal itu berarti juga menerapkan konsep aturan hukum. Karena sudah mematuhi aturan yang telah di berikan oleh tim manajemen bos. Hal tersebut juga sesuai dengan undang-undang nomor 02 tahun 2022 pasal pasal 35 ayat 1 yaitu Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.

Pembahasan

A. Evaluasi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dalam pencatatan dan pelaporan.

Setiap penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

Berdasarkan hasil lapangan jika dikaitkan dengan aturan diatas dalam aspek pencatatan bahwa SMK YAPALIS Krian setiap pengeluaran dan pemasukan dana BOS telah di catat dalam buku kas umum disertai bukti transaksi seperti kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan pada saat pencatatan, serta tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Pencatatan yang dilakukan oleh SMK YAPALIS Krian sudah sesuai dengan arahan dan petunjuk tim BOS provinsi.

Petunjuk tersebut diantaranya : (1) Kepala satuan pendidikan penerimaan dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat: a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler tahap I b. Tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler tahap II dan c. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan dana BOS Reguler dan dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil lapangan jika dikaitkan dengan aturan diatas dalam aspek pelaporan bahwa SMK YAPALIS Krian dalam membuat laporan sesuai dengan petunjuk tim BOS, waktu pelaporan realisasi anggaran dana BOS dilakukan tiap satu triwulan dan juga laporan rekapitan tahunan kemudian laporan itu nantinya akan diberikan kepada cabang dinas.

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Nurul Hasan sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan teori diatas.

B. Pengelolaan Akuntabilitas Agar Dapat Mewujudkan *Good Governance*

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaitu Penerapan prinsip *good governance* dalam penggunaan Dana BOS di SMK YAPALIS Krian telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). SMK YAPALIS Krian menggunakan penyusunan anggaran Dana BOS dengan sistem ARKAS. ARKAS adalah sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.

Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan di SMK YAPALIS Krian, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan anggaran sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem *bootom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan serta komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, staff, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS SMK YAPALIS Kria diterapkan dengan adanya ketelibatan guru, staff, dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta laporan kegiatan dan anggaran yang ada sudah di publikasikan melalui laporan pertanggungjawaban dana BOS yang tersedia diruang guru dan papan informasi sekolah. Dan juga adanya tim audit atau pengawas yang independen dari dinas pendidikan kabupaten dan provinsi. Prinsip transparansi ini terpenuhi sesuai dengan indikator yang dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan informan.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS SMK YAPALIS Krian yaitu dengan membuat laporan pengelolaan Dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu yayasan, orang tua, dan pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan untuk dana BOS Provinsi dilaporkan per semester. Jadi, penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana BOS SMK YAPALIS Krian sudah sesuai dengan indikator pencapaian *good governance* dibuktikan dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan dan adanya pelaporan dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana BOS.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh [19] tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan lancar yaitu RKAS dilakukan sebagai proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilakukan sesuai juknis, dan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah (BOS). Dana bantuan operasional sekolah (BOS) terbuka untuk sekolah. Fakta di atas menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai dengan juknis peraturan pemerintah tentang penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian saya yang dilakukan di SMK YAPALIS Krian bahwa sekolah sudah menerapkan *good governance* dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan SMK YAPALIS Krian juga sudah mematuhi undang-undang yang berlaku.

Pertisipasi guru dan staff SMK YAPALIS Krian, yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. SMK YAPALIS Krian merupakan sekolah swasta yang telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana SMK YAPALIS Krian berasal dari Dana Gratis dan Dana BOS yang dibuat laporan keuangannya secara terperinci. SMK YAPALIS Krian membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada stakeholders.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK YAPALIS Krian sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator *good governance*, yaitu transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS pada masing-masing sekolah tersebut. Selain itu, dengan membuat laporan kegiatan penggunaan dana BOS dan memublishnya ke pihak yang berkepentingan dapat menunjukkan bahwa SMK YAPALIS Krian sudah transparan dan terbuka.

Keterbatasan Penelitian

Adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi SMK YAPALIS Krian sebaiknya publikasi penggunaan dana BOS dilakukan di tempat umum seperti papan informasi agar transparansi lebih terbuka terhadap masyarakat sekolah dan halayak umum.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menambahkan variabel lain seperti efektivitas yang tidak termasuk dalam penelitian ini serta penentuan indikator yang lebih tepat sehingga nantinya diharapkan dana BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan kuat terhadap hasil belajar siswa.

3. Bagi semua stakeholder yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk menghindari tindakan pidana dikemudian hari.

Saran

Adapun keterbatasan yang dapat di berikan oleh peneliti untuk Peneliti Selanjutnya yaitu agar penelitian selanjutnya Menambahkan Informan Akademisi / Teoritisi dikarenakan informan yang digunakan peneliti semua dari segi pelaksana dana BOS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selain proses yang cukup menguras waktu dan pikiran, penyelesaian dalam penelitian ini tidak lepas dari segala usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak. Terima kasih ini ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen sebagai tempat peneliti menimba ilmu sehingga sebagai modal dalam melakukan penelitian ini. Tidak lupa juga terima kasih pada pihak-pihak yang memberikan dukungan hingga terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- [1] Kurnia Ulfah Fadhilah, Ade Irma Suryani Lating, Alphasyah Sidarta, And Sulthon Falih Rasyid Rabbani, "Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Surabaya," *J. Buana Akunt.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 151–167, 2023, Doi: 10.36805/Akuntansi.V8i2.5646.
- [2] A. Dan, G. Andalas, F. Harpranisa, C. Ronanda, And F. Sulistiyowati, "Good Government Governance Dan Kualitas Anggaran," *J. Akunt. Dan Gov. Andalas*, Vol. 3, No. 1, Pp. 50–68, 2020.
- [3] Fauzan, "Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *Perbanas Account. Conf.*, Pp. 1–26, 2022.
- [4] H. Susanti, "Penerapan Good School Governance (Gsg) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (Bos) Sekolah Dasar Kota Blitar," *Revital. J. Ilmu Manaj.*, Vol. 8, No. 1, 2019, [Online]. Available: [Http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رساله های](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رساله های) [http://www.albayan.ae%0ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=aplikasi+pengena](http://www.albayan.ae%0ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=aplikasi+pengena&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhask=Ed9c9491b4&itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0ahttp://www.albayan.ae%0ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=aplikasi+pengena)
- [5] N. A. Salam, S. Basamalah, And Subhan, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah," *Parad. J. Ilmu Ekon.*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- [6] K. U. Fadhilah, "Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sdi Wachid Hasyim Rungkut Kidul Surabaya)," *Parad. J. Ilmu Ekon.*, Vol. 6, No. 3, Pp. 172–186, 2023, Doi: 10.57178/Paradoks.V6i3.641.
- [7] D. M. Resdianti, "Analisis Penerapan Prinsip Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sdn Mejasem Timur 02 Kec. Kramat Kab. Tegal," 2021.
- [8] Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian," *Penelitian*, 2017.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [10] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, 2019, Doi: 10.18592/Alhadharah.V17i33.2374.
- [11] D. M. A. Lexy J. Moleong, "Moleong, Lexi J, 2014. " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya., " *Pt. Remaja Rosda Karya*, 2019.
- [12] A. Anggito And J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st Ed. Sukabumi, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018.
- [13] J. W. Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed, Research Design*. Jakarta: Pustaka Pelajar., 2017.
- [14] L. J. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Revisi, Cetakan Ketigapuluh Delapan, 2018.
- [15] M. . Prof. Dr.. Lexi. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- [16] L. I. F, Sulfiati., Andi, Samsu Alam., Andi, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)," *Gov. J. Ilmu Pemerintah.*, Vol. 2, No. 41, Pp. 185–201, 2019.
- [17] Dhiah Ayu Natalia, "Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola

- Zakat Di Kabupaten Sukoharjo),” 2019.
- [18] Thanwain, A. Jumarding, And Nurhidayanti, “Penerapan Good School Governance Pada Pengelolaan Dana Operasional Sekolah,” *J. Mirai Manag.*, Vol. 8, No. 1, Pp. 357–373, 2023.
- [19] E. Oga, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja,” 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.